



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PASER TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Paser;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian permasalahan lahan, dan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan perlu diatur mengenai rencana aksi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengembangan perkebunan kelapa sawit diselenggarakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN PASER TAHUN 2022-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Paser.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.



9. Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
10. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.
12. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut RAD-KSB Kabupaten Paser, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten Paser.
13. Akses Pasar adalah kegiatan melakukan fasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual, agar terjadi komunikasi dan transaksi dalam rangka pengembangan industri sawit

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, Pekebun, dan Perusahaan Perkebunan untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB II  
SISTEMATIKA, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD–KSB Kabupaten Paser disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan  
BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi  
BAB IV : Penutup
- (2) Dokumen RAD–KSB Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Maksud RAD-KSB Kabupaten Paser ini adalah memberikan arahan dan panduan kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kelapa Sawit di Kabupaten Paser. Agar pelaksanaan pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser lebih terarah, berhasil guna, dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani khususnya, dan masyarakat di kawasan pedesaan secara umum. Selanjutnya, berdampak bagi peningkatan PAD dan berkontribusi sebagai penghasil devisa negara.
- (2) RAD-KSB Kabupaten Paser ini bertujuan untuk:
  - a. menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah.
  - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. restorasi dan perbaikan bentang alam;
  - d. memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyejahterakan masyarakat;
  - e. membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun.

- f. membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
  - g. membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan daerah secara optimal.
- (3) Sasaran RAD-KSB Kabupaten Paser ini meliputi keberhasilan penerapan atau implementasi dari 7 (tujuh) tujuan RAD KSB Kabupaten Paser.

### BAB III

#### INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RAD-KSB KABUPATEN PASER

##### Pasal 5

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB Kabupaten Paser terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan Akses Pasar.

##### Pasal 6

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diarahkan untuk program:

- a. Registrasi Surat Tanda Daftar Budidaya;
- b. Penguatan data perkebunan kelapa sawit;
- c. Infrastruktur; dan
- d. Koordinasi dan sosialisasi.

##### Pasal 7

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diarahkan untuk program:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pekebun;
- b. Peningkatan kapasitas Pekebun;
- c. Penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP);

- d. Integrasi dan intensifikasi; dan
- e. Kemitraan Pekebun.

#### Pasal 8

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diarahkan untuk program :

- a. pemantauan lingkungan; dan
- b. pengembangan Industri Hilir Produk Turunan Kelapa Sawit.

#### Pasal 9

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diarahkan untuk program pembenahan izin dan kebijakan terhadap perkebunan.

#### Pasal 10

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* dan Akses Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diarahkan untuk program Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil*.

### BAB IV

#### TIM PELAKSANA DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser dibentuk Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim Pelaksana RAD-KSB Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, perangkat daerah terkait di Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana RAD-KSB Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V  
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) RAD-KSB Kabupaten Paser dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi pelaksana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dengan melibatkan perangkat Daerah terkait di Daerah, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyampaian aspirasi publik;
  - b. konsultasi publik;
  - c. rapat dengar pendapat umum;
  - d. kunjungan kerja;
  - e. sosialisasi; dan
  - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB Kabupaten Paser diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana RAD-KSB Kabupaten Paser.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara tertulis disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik kepada Tim Pelaksana RAD-KSB Kabupaten Paser.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB Kabupaten Paser disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional – Kebun Sawit Berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser melalui Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Kabupaten Paser kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Paser bersumber dari: (ditabulasi)
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah ;dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana paser  
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PASER



ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PASER  
 NOMOR 46 TAHUN 2023  
 RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN PASER TAHUN 2022-2026

PEMETAAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH  
 KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
 KABUPATEN PASER, KALIMANTAN TIMUR 2022 - 2026

No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2022	2023	2024	2025				2026
1	2	3	4	5	6	7	8				
A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur											
1. Program Registrasi STDB											
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah STDB yang diterbitkan;	500 Dokumen	2500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	7500 Dokumen	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Bag.SDA Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Kantor Pertanahan ATR/BNP Pelaku usaha perkebunan Camat dan Kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten, APBN
2. Program penguatan data perkebunan kelapa sawit											
2	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, dan pangan	Penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	0	1	1	0	0	Bappedalitbang	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BNP Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	3	4	6	7	8						
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil pembangunan daerah	Profil pembangunan daerah	1	1	1	1	1	Bappedalitbang	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten
4	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, dan pangan	Penyusunan Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	0	1	1	0	0	Bappedalitbang	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menyusun dokumen aset desa tepat waktu	139	139	139	139	139	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	1	1	1	1	1	7	8	
6	Peningkatan SDM pemerintah desa dalam mendata persil tanah	Pelatihan pemerintah desa dalam mendata persil tanah	Jumlah Pemerintah Desa yang dilatih dan melakukan Pendataan Persil tanah	1	1	1	1	1	ATR BPN	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat	APBD Kabupaten
7	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi dan Evaluasi Dokumen RDTR dan PZ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	PUTR	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Camat dan kades setempat	APBD Kabupaten
<b>3. Program infrastruktur</b>											
8	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	Teriaksannya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	48	48	48	48	48	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaku usaha perkebunan Camat dan Kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
<b>4. Program Koordinasi dan Sosialisasi</b>											

No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan		
				2022	2023	2024	2025				2026	
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang desa yang dilaksanakan dalam rangka menginformasikan tentang Kelapa Sawit	Jumlah kegiatan musrenbang desa yang dilaksanakan	10	10	10	10	10	6	Kecamatan Paser Blekong, Tanah Grogot, Tanjung Harapan, Long Kali, Batu Sopang, Long Iki, Batu Enggau, Muara Samu, Kuaro, Muara Komam	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
10	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga	
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten	

**B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN**

5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2022	2023	2024	2025				2026
12	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	3 kegiatan penyuluhan kelembagaan petani di desa	4 terlakannya jumlah penyuluhan kelembagaan petani di desa	67	70	90	90	90	6 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7 Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	8 APBD Kabupaten
13	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kab/kota	Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kab/kota	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
14	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota	Kegiatan Pemberdayaan Koperasi	Persentase peningkatan jumlah omzet per koperasi	255	257	260	265	270	Disperindakop	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
15	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan propinsi	Kegiatan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	6	6	6	6	6	Disperindakop	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga

No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026	6	7	8
16	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok masyarakat sekitar tahura	Jumlah Kelompok Masyarakat Daerah Penyanga yang mendapatkan pembinaan ekonomi.  Jumlah masyarakat sekitar Tahura yang mendapatkan Pembinaan/pelatihan.	95	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit	APBD Kabupaten APBD Provinsi
17	Program pengembangan dan pengendalian bencana perkebunan	Pembentukan dan pelatihan untuk Kelompok tani peduli api	terbentuk dan berkembangnya Kelompok tani peduli api	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kesatuan Pemangku Hutan Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
6. Program peningkatan kapasitas pekebun											
18	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkerasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan pengurus/pengawas/ anggota koperasi	Jumlah pengurus/ pengawas/ anggota koperasi yang dilatih	60	60	60	60	60	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN
19	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2022	2023	2024	2025				2026
1	20	3	4	67	70	90	90	90	6	7	8
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan dan desa	pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan dan desa	terlaksananya jumlah penyuluhan di Desa						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
21	Pelatihan pencegahan dan mitigasi Kab/ kota	Pelatihan pencegahan dan mitigasi Kab/ kota	Persentase (%) aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
22	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	0%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
23	Peningkatan SDM Pekebun Kelapa Sawit	Pelatihan peningkatan SDM Pekebun Kelapa Sawit	Jumlah Kegiatan peningkatan SDM Pekebun Kelapa Sawit	6	6	6	6	6	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN (BPDPKS) Pihak Ketiga

7. Penyelenggaraan Good Agriculture Practice (GAP)



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2022	2023	2024	2025				2026
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026	6	7	8
24	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN (BPDPKS) Pihak Ketiga
25	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	Penyuluhan Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	Terlaksananya Penyuluhan perlindungan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	215	50	60	65	65	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanian ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN (BPDPKS) Pihak Ketiga
<b>8. Program Integrasi dan Intensifikasi</b>											
26	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kec	Peningkatan mutu benih/ bibit ternak	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
27	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (UPT Pembibitan Tanaman Perkebunan)	Pengadaan Bibit Sawit	Jumlah Bibit Sawit yang diadakan	8000	12000	8000	8000	10000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga

No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2022	2023	2024	2025	2026				
1	28	2	3	4	1	1	1	1	1	6	7	8
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibentuk	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten	
9. Program Kemitraan												
29	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Penyuluhan Pertanian	teraksananya penyuluhan pertanian	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga	
30	Program kemitraan perusahaan dengan Pekebun sawit swadaya	Fasilitasi Kemitraan perusahaan dengan pekebun sawit swadaya	Adanya kemitraan antara perusahaan dan kelembagaan pekebun sawit	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga	
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN												
10. Program pemantauan lingkungan												



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2022	2023	2024	2025	2026			
31	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	20	22	24	26	28	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten
32	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	Tertaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	0	0	30	30	30	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretariat Daerah Bag. Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten
33	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten kota	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten kota	Tertaksananya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten
34	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) aparatur dan warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan	0%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten

No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2022	2023	2024	2025				2026
1	2	3	4	20	50	25	25	25	6	7	8
35	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi
36	Program penetapan ANKT	Identifikasi dan fasilitas adanya peta ANKT Kabupaten paser	Peta Indikator ANKT kabupaten Paser	1	1	1	1	1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sekretariat Daerah Bag.Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Lingkungan Hidup Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi
<b>11. Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO</b>											
37	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan peizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan UMKM	Jumlah UMKM yang diberdayakan	50	50	50	50	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi
38	Pendataan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Pendataan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Persentase UKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten	25	50	75	80	95	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan		
				2022	2023	2024	2025	2026					
39	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Fasilitasi Kemitraan usaha mikro	1	1	1	1	1	6	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	7	8	APBD Kabupaten APBD Provinsi
40	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah UKM yang difasilitasi perizinannya	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan			APBD Kabupaten APBD Provinsi
41	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah kegiatan pelatihan UMKM	1	1	1	1	1	Disperindakop	Sekretariat Daerah Bag. Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan			APBD Kabupaten



No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan					PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaan
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	10	10	10	10	10	6	7	8
42	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil	10	10	10	10	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi
43	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	Jumlah kegiatan fasilitasi/Pembiayaan yang dilakukan	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi
<b>D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGGANGAN SENGKETA</b>											
<b>12. Pembenahan Izin dan kebijakan terhadap perkebunan</b>											
44	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /kota	Persentase pemutahiran data IKM	45	50	55	60	60	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi
45	Penerbitan izin usaha industri ( IUI ) kecil dan IUI Menengah	Penerbitan izin usaha industri ( IUI ) kecil dan IUI Menengah	Jumlah Rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah yang di terbitkan	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi





No	Kegiatan (Renstra PD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan				PD Penanggung Jawab	PD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2022	2023	2024	2025			
1	49	Penyusunan kebijakan terkait Crude Palm Oil	4 kebijakan terkait Crude Palm Oil	1	1	1	1	6	7	8
		3 penyusunan Peraturan kebijakan terkait Crude Palm Oil		1	1	1	1	Bapedalitbang	Sekretariat Daerah Bag. Sumber Daya Alam Bag. Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten
<b>E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT</b>										
	50	Program sertifikasi ISPO	13. Program Sertifikasi ISPO	2	2	2	2	2	2	2
		Fasilitasi dan identifikasi kelompok kelompok Sertifikasi	Adanya Kelompok tersertifikasi Izin Usaha Perkebunan Jumlah Izin Perkebunan yang memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2	2	2	2	Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga
	51	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Penyuluhan pertanian	100	100	100	100	100	100	100
		Penyuluhan pertanian	teraksananya penyuluhan pertanian					Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan Provinsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pertanahan ATR/BPN Pelaku usaha perkebunan Camat dan kades setempat Asosiasi petani kelapa sawit Mitra Pembangunan	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Pihak Ketiga

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN TEKNIK SETDAKAB PASER

  
ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI